



AJUKAN LAGI: Terjadi lonjakan pemohon reaktivasi peserta BPJS PBI di MPP Terminal Dhaksinarga Gunungkidul.

159.707 Penerima BPJS PBI DIJ Dinonaktifkan

Pengajuan Kembali Bisa melalui Pemkab/Pemkot Setempat

JOGJA - Sebanyak 159.707 peserta BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) di DIJ dinonaktifkan awal 2026 akibat pemutakhiran data dari data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) ke data tunggal sosial dan ekonomi nasional (DTSEN). Proses pengajuan kembali bisa dilakukan melalui pendataan ulang oleh pemkab/pemkot masing-masing.

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) DIJ Endang Patmintersih membenarkan adanya penonaktifan kepesertaan tersebut. Bahkan, jumlahnya dibandingkan tahun lalu meningkat berkali lipat.

"2025 itu ada sekitar 7.000 anggota BPJS PBI dinonaktifkan di seluruh DIJ," ujarnya saat dikonfirmasi, kemarin (8/2).

Pada bulan Januari tahun ini,

lanjutnya, ada sebanyak 159.707 peserta yang dinonaktifkan, rinciannya, Kabupaten Kulon Progo terdapat 15.208, Bantul 31.965, Gunungkidul 56.087, Sleman 34.143, dan Kota Jogja 22.304.

"Kami dari kemarin mengimbau agar pemkab/kot segera melaporkan agar segera diaktifkan," jelasnya.

Ia meminta agar pemkab/pemkot melakukan pendataan ulang melalui dinsos masing-masing daerah. Apabila syarat dan ketentuan dapat terpenuhi, hasil pendataan terbaru itu bisa langsung diusulkan ke Kementerian Sosial (Kemensos). Sebab, proses pengusulan itu dilakukan melalui sistem.

"Kenapa lebih banyak dari tahun lalu, karena ini kan ada perubahan DTKS ke DTSEN, kita perlu mengusulkan lagi," terangnya.

Terpisah, Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinsos Kota Jogja Supriyanto mengatakan, sebanyak 20.000 BPJS PBI di Kota

Jogja juga dinonaktifkan. Penyebabnya adalah faktor perubahan desil. Selama ini, peserta yang terdaftar di BPJS PBI masuk dalam kategori desil 1 hingga 5.

"Tapi ternyata ada di dalamnya di luar desil itu, itu yang dinonaktifkan," ujarnya.

Dampak penonaktifan kepesertaan BPJS PBI itu, salah satunya masyarakat tidak bisa lagi mengakses manfaat penerima bantuan. Namun, beberapa kasus mereka ter-cover dari program PBI anggaran pendapatan belanja daerah (APBD).

Fenomena penonaktifan kepesertaan itu terjadi di seluruh daerah di Indonesia. Saat ini Pemkot Jogja sedang melakukan pengusulan ulang bagi masyarakat yang masih dalam kategori desil 1 hingga 5.

"Ada mekanisme pemutakhiran data melalui musyawarah di kalangan masing-masing bagi mereka yang dinonaktifkan," tambahnya. **(oso/wia/fj)**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 29 Mei 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005